

Urgensi Moralitas Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia

(Telaah Kritis dan Normatif terhadap
Berkembangnya Sifat Pragmatisme
dan Oportunistik)



Nurul Zuriah

Masalah krisis moral yang terjadi dalam dunia pendidikan, secara tidak langsung berkait dengan banyak hal dan aspek bidang. Bahkan krisis apa pun biasanya berhulu pada masalah pendidikan. Maka penanganan krisis moral pendidikan yang mengembangkan sifat pragmatisme dan oportunistik harus dimulai dari dunia pendidikan. Salah satu yang perlu dikembangkan adalah pendidikan humaniora yang bisa memperkaya dan membantu kepribadian manusia ke arah kearifan.

Perbincangan masalah pendidikan selalu menarik tidak hanya dalam setiap kelahiran kebijakan politik, melainkan juga dalam setiap siklus pergantian tahun ajaran baru. Persoalan pendidikan tidak serta merta mereda setelah lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) 10 tahun yang lalu, karena masalahnya banyak berkaitan dengan hampir seluruh dimensi kemanusiaan dan kebangsaan.

Persoalan pendidikan sebenarnya telah berlangsung setua peradaban dan sudah muncul menjadi perdebatan di antara filsuf Yunani Kuno. Di samping itu pendidikan bukan saja merupakan persoalan strategis bagi suatu negara melainkan juga bagi setiap orang, baik ia pejabat negara maupun rakyat biasa. Dalam perspektif demikian persoalan pendidikan akan melibatkan seluruh dimensi kemanusiaan dan kenegaraan sekaligus.

Selain itu, persoalan pendidikan muncul bersamaan dengan kompleksitas kebutuhan manusia dan kebutuhan tersedianya tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi dalam menyumbang kemajuan pembangunan bangsa. Akibatnya kepentingan dan keunikan individu terpaksa mengabdikan dan disesuaikan dengan kepentingan besar atas nama pembangunan. Seluruh potensi kemanusiaan diarahkan bagi pencapaian tujuan produktivitas pembangunan melalui pendidikan. Seluruh kekayaan spiritual serta keunikan pribadi manusia ditempatkan sebagai bagian dari banyak faktor pembangunan lainnya.

Berangkat dari fenomena di atas, persoalan pendidikan yang lagi krusial di saat krisis seperti ini jauh lebih rumit dari sekadar kualitas dan mutu, melainkan berkaitan dengan problem/krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis moral atau etika dalam pendidikan. Satu realitas sosial yang layak untuk dikaji dalam perspektif ini adalah persoalan krisis moral atau dekadensi moral dalam masyarakat yang sedang sakit, yang meresahkan dan menimbulkan berbagai perilaku destruktif yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Pendidikan sering dijadikan kambing hitam atas kesalahan-kesalahan dan ketidak-

beresan yang terjadi dalam masyarakat. Tingginya angka pengangguran dikatakan sebagai akibat dari kurang becusnya pendidikan menyiapkan sumber daya manusia. Tingginya angka kejahatan dan kriminalitas selalu dihubungkan dengan kurangnya para guru memasukkan nilai-nilai moralitas dalam kurikulum dan pengajaran. Ketidak becusan para pekerja dalam industri dikatakan, pendidikan tak terkait dan sepadan dengan tuntutan dunia kerja. Kenyataan yang seperti ini membuat kita harus berpikir kembali terhadap pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Apalagi kalau kita kaji secara kritis dan normatif hasil pendidikan selama ini ditengarai, (*out put*) produk yang dihasilkan adalah manusia-manusia yang penuh dengan sifat pragmatisme dan oportunistik. Berangkat dari tengara di atas, maka tulisan ini berusaha mengupas permasalahan moralitas dalam pendidikan dalam menekan tumbuhnya sifat pragmatisme dan oportunistik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi pembangunan ini.

Krisis Moral

Sejak pemerintahan Orde Baru (Orba) dan digulirkannya era reformasi betapa banyak kasus krisis moral yang melanda bangsa ini. Kasus-kasus korupsi, kolusi, manipulasi, nepotisme, perkosaan, penjarahan, pembantaian dan baku hantam sesama manusia, antar etnis, agama dan pendukung partai politik hampir tiap hari selalu mewarnai pemberitaan pers dan media massa kita.

Utopia yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang berbudi pekerti luhur, yang cinta damai, adil dan makmur seakan-akan hanya merupakan slogan saja. Distopia atau keadaan yang tidak diinginkan oleh bangsa ini, malah menjadi suatu kenyataan. Betapa sedih dan memprihatinkan kondisi bangsa ini yang tercabik-cabik dalam menghadapi krisis moral dan ekonomi yang berkepanjangan dan melelahkan.

Nilai-nilai Moral Pancasila yang telah diajarkan dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi pun tidak mampu menghadapi

gejolak krisis moral yang ada. Hanya lewat agamalah kita banyak berharap. Agama sebagaimana didefinisikan Roland Roberston dalam bukunya *Agama dalam Analisis Sosiologis*, merupakan benteng moralitas bagi umat. Dalam agama telah diatur bagaimana menjalin hubungan yang baik antara sesama manusia dan antara manusia dengan Tuhannya. Demikian pula dalam ajaran Islam, agama adalah petunjuk

(*hudan*) bagi manusia, agar manusia senantiasa terkontrol dalam tingkah laku yang luhur, saling mengasihi dan mencintai, karena sesungguhnya dalam ajaran agama dinyatakan manusia yang beriman adalah bersaudara.

Namun, ironisnya, di tengah derasnya arus modernisasi dewasa ini, nilai-nilai agama pun tampaknya semakin tercerabut dari tingkah laku manusia. Jahiliah baru seolah hadir kembali di tengah peradaban yang diagungkan ini. Hukum rimba yang menganut prinsip *homo homini lupus* sepertinya muncul sebagai kekuatan baru.

Modernisasi dan materialisme yang sering membuat kesenjangan sosial, ditambah lagi dengan semakin parahnyanya korupsi, kolusi, nepotisme, kartel ekonomi dan bisnis anak-istri pejabat semakin memperjelas dan memperlebar kesenjangan sosial. Munculnya sifat-sifat pragmatisme yang memandang segala sesuatu dari aspek kegunaannya dan oportunistik yang melihat dari segi keuntungannya semakin memperparah terjadinya krisis moral ini. Padahal dalam ajaran agama, Nabi Muhammad saw. telah memberi teladan moralitas yang luhur lewat pembinaan *ukhuwah*, menyantuni fakir miskin, menegakkan keadilan, kejujuran, dan memberantas korupsi. Namun nilai-nilai luhur yang diajarkan agama itu kini tampaknya semakin terabaikan karena derasnya tuntutan hawa nafsu.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah lahirnya krisis moral adalah karena mun-

culnya ketidakadilan, kesenjangan, dan kecemburuan sosial. Sistem ekonomi yang membuat si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin termasuk salah satu faktor penyebab kecemburuan sosial. Sistem ekonomi yang demikian ditambah lagi dengan semakin sempitnya lapangan kerja membuat persoalan semakin rumit.

Manusia yang dilanda problem sosial ekonomi, membuat

kehadiran agama tidak bisa maksimal. Agama yang diharapkan mampu memperkokoh iman dan akhlak manusia sering luntur dan rapuh tatkala dihadapkan pada persoalan sosial ekonomi yang menghimpit. Karena sesungguhnya agama bukan hanya mengatur masalah akhirat semata, namun juga masalah dunia. Manusia yang dilanda kesengsaraan dan kemiskinan sulit untuk menjadi orang yang saleh. Berangkat dari kondisi inilah maka persoalan pentingnya nilai moral terutama moral agama sangat diperlukan kehadirannya dalam sistem pendidikan di Indonesia, sebagai suatu upaya menekan timbulnya budaya dan sifat pragmatisme-oportunistik, materialisme-konsumerisme dalam kehidupan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Nilai-nilai moral Pancasila yang telah diajarkan dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi pun tidak mampu menghadapi gejolak krisis moral yang ada. Hanya lewat agamalah kita banyak berharap.

Akar Permasalahan

Alvin Toffler (dalam Tarigan, 1989) menilai bahwa pendidikan negara-negara maju di dunia ini pada dasarnya ditata secara saksama untuk menghasilkan manusia yang cocok dengan kebudayaan industri, yang menghendaki agar pemuda-pemuda menganut nilai materialistik, yang memandang kejayaan sebagai keberhasilan mengumpulkan dolar dan yen. Pendapat Toffler ini tidak salah, dan memang demikian kenyataannya. Namun yang mengherankan adalah, kenapa pendapatnya ini juga banyak dianut oleh negara-negara berkembang yang masih memerlukan pengetahuan sikap dan kepribadiannya.

Sebab kalau pendidikan di negara berkembang semisal Indonesia hanya mengejar kejayaan nominal, yang akan muncul adalah sikap persaingan bebas tidak terkendali lagi. Hal ini juga merupakan indikasi proses penge-tatan kepribadian dan identitas suatu bangsa akan terhambat oleh budaya yang saling eks-ploitasi. Kondisi ini terjadi karena yang dite-kankan dalam pendidikan seperti di atas hanya mengejar satu sisi saja dalam prosesnya, tanpa melihat tugas utama pendidikan, yaitu mema-nusiakan manusia, membebaskan manusia dari keterbelakangan dan mengangkat harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya, tujuan ekonomis pendidikan sangat ditekankan dalam setiap prosesnya. Sehingga produk yang dihasilkan sangat rentan terhadap perubahan zaman. Karena ba-gaimanapun, pendidikan yang orientasi awal-nya hanya menekankan pada hal-hal yang bersifat ekonomis, *out-put*-nya kurang memi-liki kekuatan psikologis untuk menghadapi situasi baru. Hal ini disebabkan selama mereka berada dalam proses pendidikan tidak diberi bekal kreatif untuk menghadapi perubahan-perubahan zamannya. Kepribadian dirinya akan senantiasa labil, mengingat kondisi jiwa-nya tidak ditantang selama mereka mengikuti pendidikan.

Pendidikan seperti itu adalah pendidikan yang distortif, dalam artian proses itu sudah menyimpang dari unsur-unsur kemanusiaan. Padahal pendidikan yang semata-mata me-nyiapkan orang sekadar bergelut dalam meka-nisme ekonomik tanpa menghormati unsur kepribadian lainnya yang sekaligus meningkat-kan ketergantungan orang itu pada nilai-nilai ekstrinsik, pendidikan itu menjadi tidak utuh lagi. Kepribadian dalam hal ini menjadi salah satu unsur utama dalam bidang pendidikan, agar manusia yang dididik tidak selalu ter-gantung kepada orang lain atau bangsa lain. Kalau saja unsur ini terlupakan, Winarno Su-rakhmad mencap ini sebagai proses anti-peda-gogis.

Pendidikan anti-pedagogis seperti itu bisa juga dikatakan sebagai proses pendidikan yang tidak bernuansa kerakyatan dan jauh dari rea-

litas sosial. Hal ini dimungkinkan, bahwa da-lam setiap proses pendidikan realitas rakyat sering dilupakan. Si peserta didik hanya diberi-kan teori-teori umum saja. Jarang sekali peserta pendidikan diajak ke lapangan sosial untuk ikut serta dengan rakyat menyelesaikan permasa-lahan-permasalahan rakyat.

Kalau ditengok kembali sejarah awal pen-didikan yang dirintis para tokoh di masa kolonial, misalnya pendidikan yang dijalankan oleh Ki Hajar Dewantara yang mendidik anak In-donesia secara sangat merakyat. Mereka begitu antusias pada permasalahan rakyat, sehingga konsep dan metode pendidikannya sangat dimusuhi oleh pihak penjajah karena dianggap membahayakan kedudukan pihak kolonial. Ki Hajar Dewantara begitu juga Mohammad Hatta, Soekarno dan para perintis kemerdekaan lain-nya, mereka menganjurkan kepada seluruh rak-yat untuk kembali mengenal identitas bangsa-nya.

Kalau pendidikan di negara
berkembang semisal Indonesia
hanya mengejar kejayaan
nominal, yang akan muncul
adalah sikap persaingan bebas
tidak terkendali lagi.

Kesadaran kebangsaan dan kepribadian Indonesia selalu diingatkan oleh mereka. Rak-yat selalu diajak untuk meningkatkan kesa-darannya, bahwa mereka sedang dieksploitasi oleh kekuatan imperialis dan kapitalis Barat. Dalam hal demikian rakyat bukan hanya pintar, tetapi mereka tahu bahwa dirinya punya ke-mampuan untuk membebaskan diri dari tekan-an imperialis dan budaya barat yang sering bersifat amoralis dan bertentangan dengan budaya timur.

Oleh karena itu, para pemimpin perge-rakan tidak mengalami kesulitan ketika akan menggerakkan kekuatan rakyat. Karena sebe-lumnya rakyat telah disadarkan dari ketidak-tahuannya, sehingga mereka bangkit untuk

mengadakan perlawanan dalam usaha menegakkan kepribadian bangsanya. Ternyata proses pendidikan yang dibangun dari rakyat, dan oleh rakyat mampu meruntuhkan kondisi dan struktur yang menindas.

Rakyat tentu saja lebih mengetahui kebutuhannya sendiri, oleh karena itu pendidikan yang bernuansa kerakyatan mutlak diperlukan, apalagi yang berdimensi moralitas. Bagaimanapun pendidikan itu bukan hanya milik penguasa saja. Rakyat pun butuh akan pendidikan yang bisa mengubah kondisi kehidupannya, terutama di masa krisis ekonomi, politik dan moral yang sulit ini. Sifat-sifat kejujuran, kemandirian, kerjasama, gotong-royong, tolong-menolong tanpa pamrih sejak awal seharusnya ditanamkan dan diwujudkan secara nyata dalam setiap proses pendidikan dan kehidupan masyarakatnya, sehingga bukan hanya sloganistik dan simbolik saja.

Namun kondisi dan persoalan tersebut menjadi begitu riskan, ketika sistem kekuasaan yang ada (di masa Orba) menginginkan rakyat tidak berpartisipasi atau kurang demokratis, yang mana proses pendidikan sudah diatur sedemikian rupa, yang semua itu hanya menguntungkan pihak penguasa semata. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum-kurikulum yang dipakai di lembaga pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi yang terkesan sentralistik dan kurang berorientasi kerakyatan.

Seperti pendapat Alvin Toffler tadi, pendidikan yang seperti ini hanya mengejar nilai-nilai yang sifatnya ekonomis. Rakyat hanya diiming-imingi oleh kelebihan-kelebihan material, tanpa dihadapkan pada permasalahan hidup sehari-hari. Sehingga partisipasi rakyat sangat timpang, mereka hanya berpikir bagaimana bisa merebut kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan. Kondisi seperti itu akan mengajarkan kepada rakyat untuk saling bersaing dalam bidang ekonomi, pada akhirnya

nanti akan memunculkan eksploitasi manusia oleh manusia. Lebih parah lagi mereka menjadi a-moral, a-sosial dan a-politis, yang paling dikhawatirkan adalah kesadaran kritis dan partisipatifnya menjadi hilang.

Kondisi ini diperparah lagi oleh konsep ilmu pengetahuan dan teori yang diberikan di lembaga pendidikan banyak mendukung keberadaan dan kelangsungan sistem

kekuasaan dan sistem ekonomi yang mapan. Prinsip yang dipakai "*knowledge is power*" menjadi acuan pemikiran para cendekiawan produk pendidikan semacam itu. Ilmu bukan diabdikan untuk kesejahteraan manusia, namun sebaliknya ilmu digunakan untuk melakukan penindasan terhadap manusia lain. Hal ini memang sangat ironis, dan konsep pendidikan yang demikian bukan untuk menyejahterakan rakyat banyak, melainkan untuk kepentingan sekelompok atau individu yang berkuasa.

Salah satu cara untuk mengatasi segala permasalahan dan ketimpangan di atas dalam tulisan ini diajukan alternatif pemecahannya, lewat pentingnya pendidikan humaniora (khususnya nilai-nilai moralitas) dalam sistem pendidikan di Indonesia sebagai suatu upaya menekan berkembangnya sifat oportunistik dan pragmatisme yang tidak sesuai dengan landasan filosofis dan sosiologis pendidikan di Indonesia.

Humaniora dan Tujuan Pendidikan

Tujuan dan fungsi pendidikan humaniora tidak saja memberikan pengetahuan yang bersifat kognitif mengenai bahan-bahan yang diajarkan. Tetapi juga mengajak menghayati, mencoba memahami dan menyelami berbagai bentuk ekspresi kemanusiaan dengan berbagai dimensinya. Dengan demikian, tidak saja potensi intelektual peserta didik tergarap, tetapi masalah kemanusiaannya sendiri, baik sebagai individu maupun dalam konteks kehidupannya sebagai warga masyarakat dan bangsa.

**Bagaimanapun pendidikan itu
bukan hanya milik penguasa saja.
Rakyat pun butuh akan
pendidikan yang bisa mengubah
kondisi kehidupannya, terutama di
masa krisis ekonomi, politik dan
moral yang sulit ini.**

Apabila di kaji lebih jauh, pendidikan humaniora berfungsi untuk membantu peserta didik dalam usahanya mengembangkan dan memperkaya kepribadiannya sebagai manusia. Pendidikan humaniora merupakan suatu pengendalian diri menuju kearifan manusiawi agar tidak timbul "tirani ilmu" dan "tirani teknologi". Kecenderungan tiranis ini muncul dalam wujudnya pada penggunaan iptek yang tidak dipergunakan untuk mempertinggi harkat, martabat dan moralitas manusia, melainkan untuk memusnahkan dan membumihanguskan kehidupan alam semesta.

Selaras dengan pendidikan humaniora di atas, maka tugas pendidikan pada hakikatnya adalah menyebarkan ide mengenai tata nilai, norma (moralitas) dan mengenai apa tujuan hidup manusia di dunia ini. Dalam konteks inilah kiranya pendidikan humaniora diperlukan keberadaannya dalam mengobati dan mengatasi krisis-krisis moral yang ada dalam masyarakat kita yang sedang sakit ini.

Pendidikan pada galibnya adalah usaha memanusiakan manusia, setiap tindakan pendidikan tak lain merupakan bagian dari suatu proses menuju kepada tujuan tertentu, yang telah dirumuskan oleh suatu masyarakat. Unesco memberikan tiga deskripsi tentang tujuan pendidikan pada umumnya, yaitu:

Pertama, pendidikan bertujuan menjadikan orang semakin menjunjung tinggi nilai-nilai luhur manusia. Tujuan pendidikan ini sering disebut "menuju humanisme ilmiah". Keluhuran manusia harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di sini manusia dipandang sebagai makhluk konkret yang hidup dalam ruang waktu dan diakui sebagai pribadi yang mempunyai martabat yang tak boleh diobjekkan.

Kedua, pendidikan hendaknya berorientasi pada keterlibatan sosial. Pendidikan *in sensu stricto*, harus mempersiapkan orang untuk hidup berinteraksi dalam masyarakat secara bertanggungjawab. Bila dalam tujuan pertama, tekanan diberikan kepada subjektivitas manusia, maka dalam tujuan kedua yang ditekankan adalah aspek sosialitas manusia.

Ketiga, pembentukan manusia sempurna. Melalui pendidikan potensi-potensi individual dikembangkan secara maksimal, sehingga terbentuk manusia yang pandai, terampil, jujur, yang tahu kemampuannya. Pembentukan manusia ini akan tercapai bila dalam diri individu tersebut terjadi proses perpaduan yang harmonis dan integral antara dimensi-dimensi manusiawi seperti dimensi fisik, intelektual, emosional dan etis atau moral.

Secara lebih khusus tujuan pendidikan nasional di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 4 UUSPN nomor 2 Tahun 1989, adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dilihat dari kondisi di atas, sebenarnya nilai-nilai etis dan moralitas dalam teori dan normatifnya sangat melekat dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Namun demikian karena itu adalah suatu *dassolen* (suatu yang diideal dan dicita-citakan) maka dalam praktik *dassein* (kenyataan yang ada) kadang masih jauh dari yang diharapkan dan perlu perjuangan yang panjang.

Berangkat dari kajian kritis-teoretis dan normatif di atas, maka urgensi atau pentingnya nilai-nilai moralitas dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia dalam rangka menekan tumbuh dan berkembangnya sifat pragmatisme dan oportunistik yang tidak sesuai dengan nilai filosofis (Pancasila) dan nilai sosiologis (paham integralistik) adalah suatu kebutuhan, dan suatu kenyataan yang harus ada dan segera direalisasikan dalam dunia pendidikan yang demokratis. Prinsip humanistik, yaitu memanusiakan manusia dan menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan sangat layak untuk dikedepankan dalam konteks ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. 1989. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Kreasi Jaya Utama.
- Dewantara, Ki Hadjar. 1977. *Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Held, Virginia. 1984. *Etika Moral Pembentukan Tindakan Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Kaswardi. 1993. *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*. Jakarta: Gramedia.
- Majelis Luhur Taman Siswa. 1976. *Pendidikan dan Pembangunan*. Yogyakarta.
- Nurgiyantoro, Burhan. 1988. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah*. Yogyakarta: BPFE.
- Soedijarto. 1998. *Pendidikan sebagai Sarana Reformasi Mental dalam Upaya Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suseno, Franz-Magnis. 1989. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Jakarta: Kanisius.